

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia, berfungsi sebagai platform untuk perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Dalam era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin pesat, sektor pertambangan yang mencakup berbagai komoditas seperti batu bara, mineral, dan logam, memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional.

Sektor ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri terkait. Namun, sektor pertambangan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan besar, termasuk fluktuasi harga komoditas global seperti fluktuasi harga batu bara Indonesia yang mencapai puncak US\$400/ton pada tahun 2022 dan turun drastis ke US\$120/ton pada tahun 2023 yang menciptakan ketidakpastian dalam penilaian aset dan pendapatan. Kondisi ini memaksa perusahaan seperti PT Bukit Asam Tbk melakukan *impairment* aset sebesar Rp 1,2 triliun pada 2023 untuk menghindari *overstatement* nilai aset. Selanjutnya regulasi yang ketat, dan isu-isu lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini telah menjadi sorotan karena sejumlah skandal akuntansi yang melibatkan manipulasi laporan keuangan, penggelapan, dan korupsi yang mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, perusahaan di sektor ini perlu

meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan dan memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan.

Keberhasilan sebuah perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang diterbitkan setiap periode. Laporan keuangan ini umumnya mencerminkan seberapa baik manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan serta kondisi keuangan yang ada. Informasi yang terkandung dalam laporan tersebut sangat penting bagi pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Mengingat betapa pentingnya fungsi dan manfaat laporan keuangan, penyusunannya harus mengikuti standar, prinsip, dan ketentuan yang berlaku. Prinsip yang umum digunakan salah satunya adalah prinsip konservatisme (Febriyani, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah skandal akuntansi yang berujung pada proses hukum sering terjadi seperti pada perusahaan PT Antam Tbk pada tahun 2021, PT Timah Tbk pada tahun 2018, dan PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 2016. Salah satu akar masalah dari skandal ini adalah kurangnya kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan yang tercermin dari minimnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi.

Pada tahun 2021 PT Antam Tbk terlibat dalam skandal 109 ton emas berlogo PT Antam yang terungkap selama periode 2010 hingga 2021 mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam penerapan prinsip konservatisme akuntansi di perusahaan tersebut. Enam mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Antam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melekatkan merek logam mulia Antam secara

ilegal pada emas yang bukan hasil produksi resmi perusahaan. Emas tersebut sebagian besar berasal dari tambang ilegal dan dicampur dengan emas legal, kemudian diedarkan di pasar bersamaan dengan produk resmi Antam. Praktik ini berlangsung selama lebih dari satu dekade dan menyebabkan terganggunya pasar emas resmi Antam serta menimbulkan kerugian negara akibat penurunan harga emas karena kelebihan pasokan di pasar (Sumber: CNBC Indonesia, 5 Maret 2025).

Dari sisi prinsip konservatisme kasus ini memperlihatkan kurangnya pengawasan dan kehati-hatian internal yang memadai. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyatakan bahwa pengawasan internal dan eksternal di PT Antam tidak berjalan efektif, yang mencerminkan tata kelola perusahaan milik negara yang buruk. Hal ini memungkinkan praktik ilegal berjalan lama tanpa tindakan pencegahan yang memadai, sehingga merugikan pasar resmi dan reputasi perusahaan (Sumber: Detik.com, 31 Mei 2024).

Dalam prinsip konservatisme akuntansi, PT Antam diduga gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan terkait aktivitas ilegal tersebut. Pendapatan dan aset dari emas yang status hukumnya belum jelas atau berasal dari sumber ilegal seharusnya tidak diakui sampai ada kepastian hukum, dan perusahaan wajib membentuk cadangan kerugian (*provision*) untuk mengantisipasi potensi kerugian. Namun, aktivitas ilegal yang berlangsung bertahun-tahun tanpa pengungkapan risiko yang memadai menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan (Sumber: CNBC Indonesia, 5 Maret 2025).

Mengenai kerugian negara, Kejaksaan Agung memperkirakan nilai kerugian akibat kasus ini berkisaran Rp 1 triliun hingga Rp 3,3 triliun. Kerugian tersebut terutama berasal dari selisih harga emas akibat kelebihan pasokan di pasar yang dipicu oleh peredaran emas ilegal berlogo Antam. Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa emas yang beredar adalah emas asli, bukan palsu, namun proses pelabelan yang dilakukan secara ilegal tanpa prosedur yang sah menyebabkan kerugian keuangan negara. Secara keseluruhan, skandal 109 ton emas Antam ini menjadi contoh nyata dari kurangnya penerapan konservatisme dan konservatisme akuntansi yang menyebabkan kerugian negara dan terganggunya pasar emas nasional. Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, serta transparansi yang lebih baik untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan milik negara (Sumber: Kompas.id, 3 Juni 2024).

Selanjutnya, PT Timah Tbk dengan kode saham (TINS) melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 2018 yang menyebabkan *overstatement* persediaan lancar dan laba bersih. Persediaan lancar yang dilaporkan awalnya sebesar Rp 4,2 triliun, setelah revisi menjadi Rp 4,1 triliun, menunjukkan *overstatement* sekitar 2%. Laba bersih yang awalnya dilaporkan Rp 531,35 miliar direvisi turun drastis menjadi Rp 132,29 miliar, penurunan sebesar 73,67%. Revisi ini menarik perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menunjukkan kurangnya kehati-hatian manajemen dalam menerapkan prinsip konservatisme akuntansi yang seharusnya mengakui kerugian lebih cepat dan pendapatan lebih hati-hati.

Manipulasi ini didorong oleh keinginan untuk menaikkan harga saham dan menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik demi menarik investor dan kreditor.

Faktor yang memicu manipulasi adalah adanya tekanan finansial (*financial stability dan financial target*), kesempatan (*nature of industry dan ineffective monitoring*), serta rasionalisasi dari manajemen (*fraud triangle*). Kasus ini mencerminkan rendahnya penerapan konservatisme akuntansi di PT Timah Tbk, di mana manajemen melakukan *markup* laba dan optimisme berlebihan dalam mengakui pendapatan dan aset, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian konservatisme. Selain manipulasi laba, terdapat juga indikasi korupsi besar yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun (Sumber: Detik.com 11 Desember 2024).

Kerugian tersebut berasal dari tiga komponen utama, yaitu kerugian akibat kerja sama penyewaan alat pengolahan timah yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp 2,28 triliun, pembayaran bijih timah dari tambang ilegal sebesar Rp 26,6 triliun, serta kerusakan lingkungan yang sangat besar mencapai Rp 271 triliun akibat aktivitas penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah (IUP).

Kasus ini menimbulkan kerugian besar bagi investor dan menurunkan kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia (Sumber: Tempo.com, 2 Januari 2025).

Selanjutnya pada tahun 2016 kasus konservatisme akuntansi yang melibatkan PT Cakra Mineral Tbk dengan kode saham CKRA yang merupakan perusahaan pertambangan, menjadi sorotan publik karena dugaan manipulasi laporan keuangan dan pengungkapan informasi palsu. Direksi PT Cakra Mineral Tbk, termasuk Presiden Direktur Boelio Muliadi, dilaporkan ke Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan pihak kepolisian atas dugaan penggelembungan nilai aset serta pelanggaran prinsip transparansi (Sumber: JPPN.com, 22 Desember 2016).

Dalam laporan tahunan 2014 dan 2015, PT Cakra Mineral Tbk mengklaim telah memiliki 55% saham di dua tambang zirkonium, yaitu PT Takaras (TIL) dan PT Murui (MJP). Namun, investigasi menunjukkan bahwa PT Cakra Mineral Tbk tidak pernah terdaftar sebagai pemegang saham (Sumber: Bisnis.com, 20 Desember 2016).

PT Cakra Mineral Tbk telah membuat laporan akuisisi PT Takaras (TIL) dan PT Murui (MJP) kepada otoritas bursa tahun 2014. Padahal, PT Cakra Mineral Tbk sama sekali belum membayar untuk sah menguasai 55% saham TIL-MJP. Para pemegang saham PT Takaras (TIL) dan PT Murui (MJP) telah didorong Boelio Muliadi dan Harun Abidin untuk menandatangani perjanjian tukar-menukar saham (*swap*). Untuk menguasai 55% saham TIL-MJP, dibayar dengan 330 juta lembar saham CKRA. Dari 330 juta lembar saham CKRA, 165 juta lembar untuk pemegang saham TIL-MJP dan 165 juta lembar untuk Harun Abidin. Sesuai perjanjian, Harun Abidin harus membayar 165 juta lembar saham CKRA kepada pemegang saham TIL-MJP berupa lima perusahaan tambang. Namun sampai sekarang Boelio belum melaksanakan kewajiban, dan kelima perusahaan yang digunakan Harun Abidin untuk membayar TIL-MJP ternyata bukan miliknya. TIL-MJP benar-benar menjadi korban. Selain itu, terdapat dugaan bahwa direksi PT Cakra Mineral Tbk secara sengaja memasukkan data palsu dalam laporan keuangan untuk meningkatkan nilai aset perusahaan (Sumber: RMOL.id, 9 November 2016).

Kasus ini semakin rumit karena direksi PT Cakra Mineral Tbk juga dituduh menggunakan laporan keuangan yang tidak akurat untuk menarik investasi dari investor domestik maupun internasional. Salah satu laporan menyebutkan bahwa kerugian yang dialami investor mencapai miliaran rupiah akibat keputusan investasi yang didasarkan pada informasi menyesatkan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa modal yang diklaim telah disetor ke kedua tambang tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang mendukung OJK untuk mengusut tuntas kasus ini guna melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal Indonesia (Sumber: Inilah.com, 9 November 2016).

Akibat pelanggaran serius ini, PT Cakra Mineral Tbk menghadapi berbagai tuntutan hukum dan sanksi administratif dari regulator pasar modal. Kasus ini tidak hanya merugikan investor secara material tetapi juga mencoreng citra pasar modal Indonesia di mata internasional. Hingga kini, kasus CKRA menjadi salah satu contoh nyata pentingnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi secara benar untuk mencegah manipulasi laporan keuangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Dari ketiga kasus tersebut memiliki pola serupa yaitu Pengakuan pendapatan atau aset terlalu optimis, Penundanaan pengakuan kerugian, dan Penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Konservatisme dapat dipahami sebagai sikap kehati-hatian atau *prudent*. (Nurlintang Ramadhani & Murni Sulistyowati, 2019) menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi adalah suatu pendekatan yang diatur dalam Standar

Akuntansi Keuangan (SAK) yang menekankan prinsip kehati-hatian. Dalam pendekatan ini, perusahaan disarankan untuk tidak terburu-buru dalam mengakui dan menilai aset serta laba, sementara mereka diharuskan untuk segera mengakui kerugian dan hutang yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jika perusahaan menghadapi situasi yang berisiko yang dapat menyebabkan kerugian atau kewajiban yang tidak terduga, mereka diwajibkan untuk segera mencatat kondisi tersebut. Dalam praktiknya, prinsip ini mengarahkan perusahaan untuk lebih cenderung mencatat kerugian potensial daripada mengakui keuntungan yang belum pasti. Akibatnya, penerapan prinsip konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan cenderung menghasilkan gambaran laba dan nilai aset yang lebih rendah atau *understatement*, sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko dan ketidakpastian di masa depan (Sanjaya et al., 2021).

Konservatisme akuntansi berfungsi untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mencegah manajemen dari tindakan manipulatif yang dapat merugikan perusahaan. Konservatisme akuntansi memiliki manfaat untuk menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba serta membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aset yang tidak *overstatement* dengan penerapan konservatisme akuntansi, dapat menghasilkan laporan keuangan yang pesimis. Hal ini diperlukan untuk menetralkan sikap optimis yang berlebihan antara manajer dan pemilik bahwa perusahaan tidak selalu mendapatkan keuntungan yang sama (Andriani et al., 2023).

Menyajikan laba yang terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berisiko dibandingkan dengan menyajikan laba yang rendah (*understatement*) karena risiko tuntutan hukum akan lebih besar jika laporan keuangan menunjukkan laba yang jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya (Yusril & Ningrum, 2023).

Konservatisme akuntansi dapat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, risiko litigasi, *debt covenant*, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, profitabilitas, *company growth*, *financial distress*, dan kualitas audit. Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan faktor kepemilikan manajerial, *debt covenant* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

Faktor pertama yang mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Variabel ini dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar. Ini mencerminkan sejauh mana manajer memiliki kepentingan finansial dalam perusahaan yang mereka kelola. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat mempengaruhi keputusan akuntansi, di mana manajer yang memiliki saham cenderung lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangan untuk melindungi nilai perusahaan dan kepentingan mereka sendiri. Kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana pihak manajerial perusahaan memiliki saham di perusahaan, sehingga manajerial akan ikut merasakan langsung manfaat maupun risiko dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, adanya kepemilikan

manajerial diharapkan dapat menyalurkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham (Oktavia & Rizal, 2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ilmiyah & Tumirin, 2022) yang berjudul ‘Pengaruh *Leverage, Growth Opportunity*, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi’ membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Semakin besar saham yang dimiliki manajemen, semakin konservatif pula metode akuntansi yang digunakan. Hal ini disebabkan karena rasa memiliki yang kuat mendorong manajemen untuk menghindari pelaporan laba yang terlalu tinggi. Laba yang tidak dilaporkan secara *overstatement* ini menciptakan cadangan dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi perusahaan dengan harapan menarik minat investor untuk menanamkan modal.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan (Ayuningtyas et al., 2023) yang berjudul ‘Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, *Cash Flow* dan Intensitas Modal Terhadap Konservatisme Akuntansi’ menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi pada *sektor Consumer Non- Cyclical*s karena tingkat kepemilikan manajerial yang sangat rendah. Kepemilikan yang sangat rendah ini dapat menyebabkan kurangnya rasa memiliki manajemen terhadap perusahaan, sehingga keputusan yang diambil lebih berorientasi pada kepentingan individu daripada kepentingan manajemen. Akibatnya manajemen mungkin cenderung melebih-lebihkan laba (*overstatement*) untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiandru et al.,

2019) yang berjudul '*Debt Covenant, Investment Opportunity, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*' penelitian tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 18 atau 60,00% kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut terlihat dari presentase kepemilikan manajerial yang diikuti tidak adanya penerapan konservatisme akuntansi pada suatu perusahaan.

Faktor kedua yang mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah *debt covenant*. *Debt covenant* adalah kontrak hutang antara kreditur dan peminjam yang bertujuan untuk membatasi tindakan peminjam yang berpotensi merusak nilai pinjaman atau menghambat pelunasannya (Budiandru et al., 2019). *Debt covenant* berfungsi sebagai pelindung bagi pemberi pinjaman. Kontrak ini dirancang untuk mencegah manajer perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan kreditur, misalnya dengan membagikan dividen dalam jumlah yang terlalu besar atau membiarkan modal sendiri (ekuitas) turun di bawah batas yang telah disetujui dalam kesepakatan. Dengan demikian, *debt covenant* memastikan bahwa perusahaan tetap menjaga stabilitas keuangannya dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya (Siska & Suwarno, 2022).

Dalam penelitian ini, *debt covenant* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio perbandingan antara total hutang dengan total aset perusahaan yang mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui hutang. *Debt to Asset Ratio* (DAR) menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal atau hutang dibandingkan

dengan sumber daya internal atau aset. Semakin tinggi DAR, semakin besar risiko keuangan karena aset perusahaan lebih banyak dijamin oleh hutang.

Penggunaan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai proksi untuk *debt covenant* didasarkan pada pemahaman bahwa semakin besar proporsi hutang terhadap aset, semakin ketat pula batasan dan pengawasan yang diterapkan oleh kreditur melalui *debt covenant* yang menunjukkan adanya tekanan dari kreditur melalui kontrak hutang untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Perusahaan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang tinggi cenderung kurang konservatif dalam pelaporan keuangannya. Hal ini disebabkan perusahaan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) tinggi merasa tertekan sehingga meningkatkan laba yang dilaporkan guna memenuhi persyaratan *debt covenant* atau menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat hutang relatif terhadap aset, semakin besar kemungkinan perusahaan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba periode berjalan, sehingga laporan keuangan menjadi kurang konservatif dan lebih optimis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siska & Suwarno, 2022), (Budiandru et al., 2019), (Hardiyanti et al., 2022) dan (Hartyawan & Kartika, 2023) membuktikan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi Hal ini mengindikasikan bahwa semakin ketat *debt covenant* yang dihadapi perusahaan, semakin konservatif pula praktik akuntansi yang diterapkan. Sementara hasil penelitian yang dilakukan (Martha & Nuratringrum, 2023) dan (Sari, 2022) menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin ketat *debt*

covenant yang dihadapi perusahaan, semakin kurang konservatif praktik akuntansi yang diterapkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi konservatisme akuntansi adalah ukuran perusahaan. Skala bisnis dapat diklasifikasikan menjadi kecil, menengah, atau besar. Dibandingkan dengan usaha kecil, perusahaan besar memiliki sejumlah keunggulan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan melalui berbagai indikator, seperti total aset, jumlah karyawan, jumlah saham yang beredar, dan jangkauan pemasaran. Peningkatan ukuran aset perusahaan sering kali berkorelasi dengan peningkatan kualitas output yang dihasilkan (Yulimtinan & Atiningsih, 2021). Para investor kerap menjadikan ukuran perusahaan sebagai pertimbangan utama dalam keputusan investasi mereka, mengingat total aset yang dimiliki perusahaan dapat mencerminkan potensi perolehan laba yang akan dihasilkan (Ridho & Arianto, 2021).

Perusahaan berskala besar cenderung menerapkan prinsip konservatisme akuntansi sebagai strategi untuk meminimalkan laba yang dilaporkan. Salah satu tujuan penerapan prinsip ini adalah untuk mengurangi biaya politis yang harus ditanggung perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula biaya politis yang harus dibayarkan, di mana salah satu komponen penting dari biaya politis ini adalah beban pajak. Dengan menerapkan prinsip konservatisme, perusahaan berupaya mengurangi laba kena pajak, sehingga dapat menekan biaya politis secara keseluruhan. (Andriani et al., 2023). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahimi & Suryaputri, 2022) yang berjudul 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Serta *Leverage* Terhadap Konservatisme Akuntansi' membuktikan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2022), (Andriani et al., 2023) dan (Febriyani, 2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi.

Berdasarkan latar belakang serangkaian kasus yang telah diuraikan di atas dan adanya kesenjangan (inkonsistensi) dalam temuan penelitian sebelumnya, mendorong penulis untuk kembali menguji faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konservatisme akuntansi dengan judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. PT Antam Tbk terlibat skandal pencetakan 109 ton emas ilegal selama tahun 2010-2021 yang menimbulkan kerugian negara berkisaran Rp 1 triliun hingga Rp 3,3 triliun. Kerugian tersebut terutama berasal dari selisih harga emas akibat kelebihan pasokan di pasar yang dipicu oleh peredaran emas ilegal berlogo Antam dan mengindikasikan lemahnya pengawasan internal serta penerapan konservatisme akuntansi, sehingga menurunkan kepercayaan investor dan integritas laporan keuangan perusahaan.

2. PT Timah Tbk terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan tahun 2018 dengan melakukan *overstatement* terhadap persediaan lancar sekitar 2% dan laba bersih sebesar 73,67% yang baru direvisi setelah mendapat sorotan dari OJK dan publik.
3. Kasus ini mencerminkan rendahnya penerapan konservatisme akuntansi di PT Timah Tbk, di mana manajemen melakukan *markup* laba dan optimisme berlebihan dalam mengakui pendapatan dan aset, bertentangan dengan prinsip konservatisme.
4. PT Cakra Mineral Tbk terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan dengan penggelembungan nilai aset dan pengungkapan informasi palsu terkait kepemilikan saham di PT Takaras dengan kode saham TIL dan PT Murui dengan kode saham MJP yang menyebabkan kerugian investor dan mencoreng citra pasar modal Indonesia.
5. Fluktuasi harga batu bara yang mencapai US\$400/ton pada 2022 dan turun drastis ke US\$120/ton pada 2023 menciptakan ketidakpastian dalam penilaian aset dan pendapatan, memaksa perusahaan seperti PT Bukit Asam Tbk melakukan *impairment* aset sebesar Rp 1,2 triliun untuk menghindari *overstatement* nilai aset.
6. Kasus manipulasi laporan keuangan menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pelaporan keuangan yang mengurangi kepercayaan investor terhadap informasi yang disajikan.

7. Kurangnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi di sektor pertambangan mengakibatkan risiko manipulasi laporan keuangan, termasuk penggelembungan laba dan aset yang dapat merugikan pemangku kepentingan.
8. Perusahaan di sektor pertambangan menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga kualitas laporan keuangan di tengah fluktuasi harga komoditas, regulasi pemerintah yang ketat, dan dampak lingkungan yang dapat memengaruhi penerapan prinsip konservatisme akuntansi dan berpotensi meningkatkan risiko kecurangan dalam laporan keuangan.
9. Kurangnya penerapan prinsip konservatisme akuntansi dapat meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan, yang tidak hanya merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan ilusi kinerja keuangan yang lebih baik dari yang sebenarnya, sehingga mengganggu stabilitas pasar saham dan kepercayaan investor.
10. Konservatisme akuntansi memiliki potensi untuk mencegah *overstatement* laba dan aset serta melindungi pemangku kepentingan dari dampak negatif manipulasi laporan keuangan.
11. Tingkat kepemilikan manajerial dapat memengaruhi penerapan konservatisme akuntansi, di mana manajer dengan kepemilikan saham tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangan untuk melindungi nilai perusahaan.
12. Ketatnya kontrak hutang (*debt covenant*) dapat mendorong perusahaan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi untuk memastikan stabilitas keuangan dan memenuhi kewajiban kepada kreditur.

13. Perusahaan besar cenderung menerapkan prinsip konservatisme akuntansi untuk mengurangi biaya politis seperti pajak dan menjaga reputasi mereka di mata investor.
14. Terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, *debt covenant*, dan ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi, yang menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dan memengaruhi praktik akuntansi di perusahaan khususnya di sektor pertambangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas tentang Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Debt Covenant*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme Akuntansi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *debt covenant* berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kepemilikan manajerial, *debt covenant*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi.
2. Menganalisis pengaruh *debt covenant* terhadap konservatisme akuntansi.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi.
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, *debt covenant*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap konservatisme akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Peneliti:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam memahami penerapan prinsip konservatisme akuntansi di sektor pertambangan. Peneliti dapat memperdalam pengetahuan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi, dampaknya terhadap laporan keuangan, serta implikasinya bagi perusahaan dan *stakeholder*. Melalui penelitian ini, peneliti dapat meningkatkan keterampilan dan mengasah kemampuan riset, analisis data, dan penulisan ilmiah dalam menyusun laporan penelitian yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi dan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi konservatisme akuntansi pada sektor pertambangan. Penelitian ini relevan dengan perkembangan terkini di dunia akuntansi, di mana isu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan semakin menjadi perhatian.

2. Manfaat bagi Institusi:

Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi akademik Universitas Negeri Medan sebagai institusi yang menghasilkan penelitian berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian ini dapat membuka peluang kerja sama antara Universitas Negeri Medan dengan perusahaan pertambangan atau lembaga terkait lainnya, misalnya dalam bentuk penelitian bersama, pelatihan, atau konsultasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan standar akuntansi, tata kelola perusahaan, dan pengawasan sektor pertambangan.

3. Manfaat bagi Objek Penelitian:

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pertambangan dalam menilai efektivitas penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan mereka. Pemahaman yang lebih baik

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi konservatisme akuntansi dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat, terutama dalam hal investasi, pendanaan, dan pengelolaan risiko. Penerapan prinsip konservatisme akuntansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat berdampak positif pada nilai perusahaan dan akses terhadap modal. Penelitian ini dapat membantu perusahaan pertambangan dalam memahami dan mematuhi regulasi yang terkait dengan standar akuntansi dan tata kelola perusahaan, sehingga dapat menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan.

4. Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan

a. Investor

Penelitian ini memberikan manfaat besar bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat dan terinformasi. Konservatisme akuntansi, sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *overstatement* laba dan aset oleh manajemen. Dengan adanya konservatisme, laporan keuangan menjadi lebih andal dan tidak mudah dimanipulasi untuk kepentingan jangka pendek manajemen. Hal ini penting bagi investor karena dapat terhindar dari keputusan investasi yang salah akibat informasi keuangan yang terlalu optimis atau tidak realistis dan konservatisme akuntansi dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor, sehingga mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan investor, serta dengan

laporan keuangan yang lebih konservatif, investor dapat menilai kinerja perusahaan secara lebih objektif, sehingga dapat memilih perusahaan yang benar-benar memiliki prospek jangka panjang yang baik.

b. Pemilik dan Pemegang Saham

Bagi pemilik dan pemegang saham, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana konservatisme akuntansi dapat melindungi kepentingan mereka dari perilaku oportunistik manajemen. Dalam teori keagenan, pemilik sering kali menghadapi risiko bahwa manajer akan bertindak untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Konservatisme akuntansi berperan sebagai mekanisme pengendalian yang membatasi ruang gerak manajer dalam melakukan manipulasi laba atau aset.